

Strategies to Strengthen Farmer Institutions in Rias Village Rice Trading System: Analytical Hierarchy Process (AHP) Approach

Strategi Penguatan Kelembagaan Petani Dalam Tata Niaga Beras Desa Rias: Pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP)

Febriyanti Putri Ulfa* , Yudi Sapt Pranoto , Founita Agustina , Kardi , Mustamid , Oktalgia , and Sandi 

University of Bangka Belitung, Bangka Regency, Bangka Belitung Island Province, 33172

* Correspondence: febriyantiputriulfa01@gmail.com

ARTICLE INFO

How to cite:

Ulfa, F., P., Pranoto, Y., S., Agustina, F., Kardi, K., Muatamid, M., Oktalgia, O., & Sandi, S. (2026). *Strategies to Strengthen Farmer Institutions in Rias Village Rice Trading System : Analytical Hierarchy Process (AHP) Approach*. *Journal of Integrated Agribusiness*, 8(1), 97-106.

DOI: [10.33019/jia.v8i1.7235](https://doi.org/10.33019/jia.v8i1.7235)

Copyright © 2026. Owned by the authors, published by the *Journal of Integrated Agribusiness*.



OPEN ACCESS

This work is licensed under a *Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License*.

Published: June 30, 2026

ABSTRACT

Farmer institutions have a strategic role in improving the efficiency of the rice trading system at the village level, especially in areas with limited market access and capital. This study aims to identify key factors and determine the priorities of strategies for strengthening farmer institutions in the rice trading system in Rias Village, South Bangka Regency. The research uses mixed methods design with qualitative dominance. Primary data were obtained through in-depth interviews and focus group discussions (FGD) with eight key respondents who were directly involved in institutional management and rice marketing. The determination of strategy priorities is carried out using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method with consistency testing to ensure the reliability of the assessment. The results show that access to financing is a top priority in institutional strengthening, followed by sustainable market partnerships, human resource capacity building, and institutional governance reform. These findings indicate that the main obstacles are functional-economic, especially the limitation of working capital and weak market relations that affect the absorption capacity of grain and the bargaining position of farmers. Therefore, institutional strengthening strategies need to be implemented gradually, starting from strengthening access to financing and market partnerships, followed by increasing managerial capacity and governance as the foundation for long-term sustainability. This research provides an empirical basis for the formulation of policies to strengthen the institution of village rice agribusiness that is more integrated and priority based.

Keywords: AHP; Access to Financing; Farmer Institutions; Market Partnerships; Rice Trading System.

ABSTRAK

Kelembagaan petani memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi tata niaga beras di tingkat desa, terutama pada wilayah dengan keterbatasan akses pasar dan permodalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kunci dan menentukan prioritas strategi penguatan kelembagaan petani dalam tata niaga beras di Desa Rias, Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian menggunakan desain mixed methods dengan dominasi kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) dengan delapan responden kunci yang terlibat langsung dalam pengelolaan kelembagaan dan pemasaran beras. Penentuan prioritas strategi dilakukan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan pengujian konsistensi untuk memastikan reliabilitas penilaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses pembiayaan merupakan prioritas utama dalam penguatan kelembagaan, diikuti kemitraan pasar berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan reforma tata kelola kelembagaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kendala utama bersifat fungsional-ekonomi, khususnya keterbatasan modal kerja dan lemahnya hubungan pasar yang memengaruhi kapasitas serap gabah serta posisi tawar petani. Oleh karena itu, strategi penguatan kelembagaan perlu diimplementasikan secara bertahap, dimulai dari penguatan akses pembiayaan dan kemitraan pasar, kemudian diikuti peningkatan kapasitas manajerial dan tata kelola sebagai fondasi keberlanjutan jangka panjang. Penelitian ini memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan penguatan kelembagaan agribisnis beras desa yang lebih terintegrasi dan berbasis prioritas.

Kata Kunci: AHP; Akses Pembiayaan; Kelembagaan Petani; Kemitraan Pasar; Tata Niaga Beras.

1. Pendahuluan

Beras merupakan komoditas pangan strategis yang memiliki peran penting dalam stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Ketergantungan sebagian besar penduduk terhadap beras, ketersediaan dan stabilitas harga beras menjadi isu kebijakan publik yang krusial karena berimplikasi langsung terhadap ketahanan pangan dan stabilitas sosial (Andrianto, 2023) Dalam perspektif tata kelola rantai pasok (*supply chain governance*), distribusi nilai tambah dan

pembentukan harga sangat ditentukan oleh struktur koordinasi antar-aktor, mekanisme kontraktual, serta pola relasi kekuasaan di sepanjang rantai nilai (Lee et al., 2012). Struktur tata kelola yang timpang berpotensi menyebabkan transmisi harga yang tidak simetris dan melemahkan posisi tawar produsen primer, sehingga berdampak pada rendahnya kesejahteraan petani (Verhofstadt & Maertens, 2015). Oleh karena itu, tata kelola rantai pasok beras yang efisien dan inklusif merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas pangan nasional. Namun demikian, sistem rantai pasok beras nasional masih dihadapkan pada berbagai permasalahan struktural, seperti panjangnya mata rantai distribusi, disparitas harga produsen dan konsumen, serta lemahnya posisi tawar petani dalam pembentukan harga (Ahmad Irfan Nurmahdy et al., 2020). Dalam konteks ini, **kelembagaan petani merupakan elemen kunci dalam tata kelola rantai pasok**, karena berfungsi sebagai mekanisme kolektif untuk mengurangi biaya transaksi, memperkuat daya tawar, serta meningkatkan akses terhadap pasar dan pembiayaan (Abate et al., 2014).

Pada tingkat lokal, persoalan rantai pasok beras semakin kompleks akibat lemahnya kelembagaan petani sebagai aktor utama produksi. Secara teoritis, kelembagaan petani berperan sebagai instrumen konsolidasi produksi, penguatan posisi tawar, serta penghubung petani dengan pasar dan sumber pembiayaan (Rahmaniah & Rahim Darma, 2023). Melalui aksi kolektif, petani dapat meningkatkan skala ekonomi, memperbaiki kualitas produk, serta memperoleh harga jual yang lebih menguntungkan (Markelova et al., 2009). Namun dalam praktiknya, banyak kelembagaan petani masih berfungsi secara administratif dan belum berkembang sebagai entitas ekonomi yang profesional yang ditandai dengan tidak adanya unit usaha aktif, ketiadaan neraca keuangan yang akuntabel, dan belum terbangunnya kontrak pemasaran kolektif dengan mitra usaha. Kondisi ini menyebabkan petani tetap memiliki posisi tawar yang lemah dan cenderung berperan sebagai *price taker* dalam sistem pasar. Kajian tentang kelembagaan petani dan tata niaga pertanian menunjukkan bahwa kelemahan organisasi kolektif berdampak langsung pada rendahnya efisiensi pemasaran, tingginya biaya transaksi, serta melemahnya transmisi harga dari pasar konsumen ke tingkat produsen (Abate et al., 2014). Dalam konteks tata kelola rantai pasok, kapasitas kelembagaan menentukan kemampuan agregasi volume, negosiasi kontrak, serta pengendalian mutu yang pada akhirnya memengaruhi margin petani (Lee et al., 2012). Pendekatan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) telah banyak digunakan untuk penentuan prioritas strategi pembangunan pertanian dan kelembagaan berbasis preferensi pemangku kepentingan (Villamor et al., 2022). Namun, penerapannya dalam konteks tata niaga beras di wilayah kepulauan dengan karakteristik fragmentasi pasar dan keterbatasan infrastruktur masih relatif terbatas, terutama yang secara eksplisit mengintegrasikan preferensi aktor lokal (petani, pemerintah desa, pelaku usaha).

Lemahnya kelembagaan petani di Desa Rias tercermin dari rendahnya kapasitas agregasi dan koordinasi pemasaran. Secara operasional, Gapoktan belum mampu melakukan konsolidasi volume gabah secara kolektif, sebagian besar petani masih menjual gabah secara individual kepada tengkulak dengan volume kecil ($\pm 1-2$ ton per transaksi), sehingga

kehilangan potensi *economies of scale* dalam negosiasi harga. Selain itu, belum terdapat kontrak pemasaran kolektif yang mengikat dengan penggilingan atau offtaker tetap, dan standar mutu gabah (kadar air dan tingkat kotoran) belum dikelola secara seragam. Kondisi ini menyebabkan variasi harga jual di tingkat petani dan memperlemah posisi tawar dalam rantai pasok. Secara struktural, kelembagaan petani masih menghadapi keterbatasan legalitas formal dan belum seluruhnya terintegrasi dengan unit usaha berbadan hukum seperti BUMDes. Secara manajerial, belum tersedia laporan keuangan periodik, pembagian fungsi organisasi yang jelas, dan sistem pencatatan usaha yang akuntabel. Sementara itu, secara ekonomi, akses terhadap pembiayaan formal dan kemitraan pasar masih terbatas, sehingga kegiatan usaha kelembagaan belum berkembang menjadi entitas ekonomi kolektif yang berkelanjutan. Dampak langsung dari kelemahan kelembagaan ini tercermin pada rendahnya margin pemasaran yang diterima petani. Tanpa konsolidasi volume dan kontrak kolektif, petani cenderung menjadi *price taker*, menerima harga 5–10% lebih rendah dibandingkan harga yang diperoleh melalui skema penjualan kolektif atau kemitraan (Fischer & Qaim, 2012). Selain itu, keterbatasan akses penyimpanan dan teknologi pascapanen meningkatkan risiko susut dan penurunan mutu, yang secara langsung menekan pendapatan bersih petani. Dengan demikian, kelemahan kelembagaan tidak hanya berdampak pada aspek organisasi, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani.

Penelitian terdahulu telah membahas penguatan kelembagaan petani dan tata niaga komoditas pertanian, namun sebagian besar masih bersifat deskriptif atau berfokus pada aspek teknis produksi dan pemasaran. Pangondo (2024), berdasarkan analisis *Institutional Development Framework* (IDF), menunjukkan bahwa kelompok tani Desa Rias telah mencapai tahap pematangan pada aspek pembentukan organisasi dan teknis budidaya, namun masih lemah pada penguatan kapasitas anggota dan ekspansi pasar. Sementara itu, Shaliha et al., (2022) menggunakan metode AHP untuk menentukan prioritas strategi peningkatan daya saing komoditas lada, dengan fokus pada peningkatan produktivitas, kualitas, dan diversifikasi produk. Meskipun relevan dalam pendekatan metodologis, studi tersebut berfokus pada komoditas perkebunan dan belum mengkaji secara spesifik tata niaga beras yang memiliki karakteristik pasar berbeda, terutama terkait stabilisasi harga dan peran kelembagaan distribusi.

Dengan demikian, terdapat *research gap* yang lebih spesifik dan bersifat metodologis maupun kontekstual. Pertama, kajian sebelumnya belum secara eksplisit mengintegrasikan preferensi multi-aktor lokal (petani, pemerintah desa, pelaku usaha) dalam merumuskan strategi penguatan kelembagaan tata niaga beras. Kedua, penerapan AHP pada studi terdahulu umumnya digunakan untuk peningkatan daya saing komoditas atau perencanaan teknis produksi, bukan untuk merancang strategi penguatan tata kelola kelembagaan dalam sistem distribusi beras. Ketiga, belum terdapat studi yang secara khusus mengkaji penguatan kelembagaan tata niaga beras di wilayah kepulauan Bangka Belitung, yang memiliki karakteristik geografis terfragmentasi dan biaya distribusi relatif tinggi. Oleh karena itu,

kebaruan penelitian ini terletak pada: (1) fokus pada tata niaga beras sebagai komoditas pangan strategis; (2) konteks wilayah kepulauan dengan karakteristik logistik dan struktur pasar yang berbeda dari wilayah daratan; (3) integrasi preferensi pemangku kepentingan lokal melalui pendekatan AHP untuk merumuskan prioritas strategi penguatan kelembagaan secara partisipatif. Berbeda dengan studi AHP sebelumnya yang menitikberatkan pada aspek teknis produksi atau daya saing komoditas tunggal, penelitian ini menempatkan kelembagaan tata niaga sebagai unit analisis utama dan mengkaitkannya secara langsung dengan implikasi distribusi nilai dan kesejahteraan petani dalam rantai pasok beras.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain *mixed methods* dengan dominasi kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi kondisi kelembagaan dan tata niaga beras, sedangkan metode kuantitatif *Analytical Hierarchy Process* (AHP) digunakan untuk menentukan prioritas strategi penguatan kelembagaan secara sistematis. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan satu sesi *Focus Group Discussion* (FGD) dengan delapan responden kunci yang dipilih secara *purposive* berdasarkan kriteria yaitu memiliki posisi strategis dalam kelembagaan (Gapoktan, BUMDes, penyuluh, dan pemerintah desa), berpengalaman minimal tiga tahun, dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan tata niaga. Jumlah responden dinilai memadai karena penelitian berbasis *expert judgment* dan sesuai dengan praktik AHP kelompok.

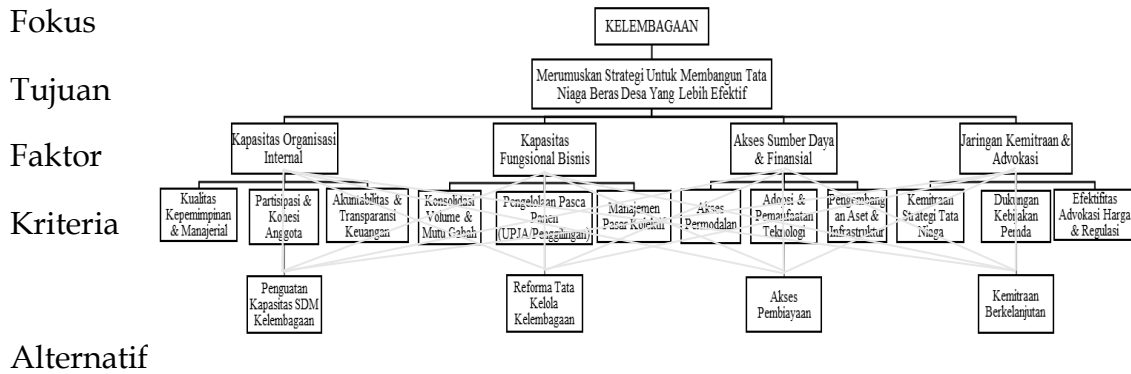
Wawancara dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan, kapasitas kelembagaan, dan kebutuhan penguatan, sedangkan FGD bertujuan membangun konsensus dan merumuskan faktor, kriteria, serta alternatif strategi. Data dianalisis secara tematik melalui reduksi, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan. Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan *member check*. Hasil analisis kualitatif menjadi dasar penyusunan hierarki AHP.

Hierarki AHP terdiri atas fokus, faktor, kriteria, dan alternatif strategi. Seluruh responden bertindak sebagai pakar dalam penilaian perbandingan berpasangan menggunakan skala Saaty (1-9). Agregasi penilaian dilakukan dengan rata-rata geometrik, kemudian dihitung bobot prioritas global menggunakan perangkat lunak AHP. Konsistensi diuji melalui *Consistency Ratio* ($CR \leq 0,10$). Strategi prioritas ditentukan berdasarkan bobot global tertinggi pada tingkat alternatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Penentuan prioritas strategi penguatan kelembagaan petani dalam tata niaga beras Desa Rias dilakukan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) berdasarkan penilaian delapan orang pakar yang sekaligus merupakan *key informants*, terdiri atas pengurus Gapoktan, pengelola BUMDes, penyuluh pertanian, dan perwakilan pemerintah desa. Seluruh responden memiliki pengalaman minimal tiga tahun dalam pengelolaan kelembagaan dan tata

niaga beras serta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Berikut struktur hierarki pemilihan alternatif strategi penguatan kelembagaan petani dalam tata niaga beras Desa Rias dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Hierarki AHP strategi penguatan kelembagaan petani dalam tata niaga beras Desa Rias

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh matriks perbandingan berpasangan memenuhi kriteria konsistensi dengan nilai *Consistency Ratio* (CR) pada setiap tingkat hierarki berada di bawah 0,10. Nilai CR agregat pada tingkat alternatif sebesar 0,06, sehingga hasil pembobotan di nilai reliabel dan dapat digunakan sebagai dasar penentuan prioritas. Struktur hierarki AHP dalam penelitian ini terdiri atas lima tingkat, yaitu: (1) fokus: penguatan kelembagaan petani dalam tata niaga beras Desa Rias; (2) tujuan: peningkatan efisiensi tata niaga dan kesejahteraan petani; (3) faktor: aspek ekonomi, kelembagaan, dan pasar; (4) kriteria: akses pembiayaan, kemitraan berkelanjutan, penguatan kapasitas SDM kelembagaan, dan reforma tata kelola kelembagaan; serta (5) alternatif strategi pada masing-masing kriteria. Hierarki ini disusun berdasarkan hasil analisis kualitatif dan diskusi pakar.

Tabel 1. Prioritas alternatif pada kriteria penguatan kelembagaan petani Desa Rias

Kriteria Intervensi	Bobot Prioritas	Fokus Solusi
Akses Pembiayaan	0,4685	Pusat serap gabah, manajemen kualitas
Kemitraan Berkelanjutan	0,2772	Kontrak penjualan kolektif.
Penguatan Kapasitas SDM Kelembagaan	0,2240	Model bisnis BUMDes, manajemen kualitas.
Reforma Tata Kelola Kelembagaan	0,0303	Konsolidasi volume, trust anggota, akses formal.

(Sumber : Olah data primer, 2025)

Hasil pembobotan menunjukkan bahwa akses pembiayaan menempati prioritas tertinggi dengan bobot 0,4685, diikuti kemitraan berkelanjutan (0,2772), penguatan kapasitas SDM kelembagaan (0,2240), dan reforma tata kelola kelembagaan (0,0303). Urutan ini menunjukkan

bahwa responden memandang permasalahan utama bersifat fungsional ekonomi dan berkaitan langsung dengan operasional tata niaga.

Dominannya akses pembiayaan sebagai prioritas utama (0,47) menunjukkan bahwa kendala struktural dalam tata niaga beras Desa Rias terletak pada keterbatasan modal kerja untuk menyerap gabah, mengelola stok, dan mengatur waktu penjualan. Tanpa dukungan pembiayaan, kelembagaan petani tidak memiliki kapasitas untuk menunda penjualan hingga harga lebih menguntungkan, sehingga posisi tawar tetap lemah. Temuan ini sejalan dengan studi yang menegaskan bahwa akses pembiayaan merupakan prasyarat peningkatan efisiensi rantai pasok dan penguatan posisi tawar petani (Agustin et al., 2025). Tanpa akses pembiayaan formal, petani cenderung menjual gabah segera setelah panen kepada tengkulak, yang pada akhirnya memperkuat ketimpangan nilai tambah dalam rantai pasok (Nurmahdy et al., 2020).

Kemitraan berkelanjutan (0,28) menempati prioritas kedua, mengindikasikan pentingnya kontrak kolektif dan hubungan pasar jangka panjang dalam meningkatkan stabilitas dan margin keuntungan. Meskipun kerja sama dengan BULOG telah memberikan stabilitas harga, transformasi menuju hilirisasi dan produksi beras bernilai tambah masih terbatas. Literatur menunjukkan bahwa kemitraan berbasis kontrak kolektif mampu meningkatkan margin serta mengurangi ketidakpastian pasar (Ilham Romadhona et al., 2022), sementara integrasi vertikal berbasis kelembagaan mampu meningkatkan efisiensi tata niaga sekaligus memperkuat daya saing agribisnis pedesaan (Widiarta et al., 2025).

Penguatan kapasitas SDM kelembagaan (0,22) mencerminkan pentingnya peningkatan kompetensi manajerial dan akuntabilitas organisasi. Keterbatasan dalam manajemen bisnis, pencatatan keuangan, dan pengelolaan BUMDes menghambat transformasi kelembagaan menjadi entitas ekonomi profesional. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menekankan urgensi literasi manajemen dan pendampingan berkelanjutan dalam penguatan kelembagaan agribisnis (Saputra & Rahman, 2024). Qomariyah et al. (2025), menunjukkan bahwa proses pendampingan jangka panjang dapat meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam memecahkan masalah kompleks, memperluas jaringan kemitraan, serta mengimplementasikan inovasi kelembagaan secara lebih terarah dan terukur.

Reforma tata kelola kelembagaan memperoleh bobot terendah (0,03). Namun, bobot rendah tidak berarti aspek ini tidak penting, melainkan dipersepsikan kurang mendesak dalam jangka pendek dibanding kebutuhan pembiayaan dan akses pasar. Tata kelola yang transparan dan berbadan hukum tetap menjadi fondasi keberlanjutan kelembagaan, terutama untuk mengakses pembiayaan formal dan membangun kepercayaan mitra (Putri et al., 2024).

Tata kelola yang transparan dan akuntabel menjadi prasyarat bagi akses pembiayaan dan kemitraan formal (Kusumadinata, 2024). Dengan demikian, reforma tata kelola lebih tepat diposisikan sebagai investasi kelembagaan jangka panjang.

Secara sintesis, strategi implementasi yang disarankan adalah dimulai dari penguatan akses pembiayaan sebagai langkah awal untuk meningkatkan kapasitas operasional, diikuti pengembangan kemitraan pasar, peningkatan kapasitas SDM, dan reforma tata kelola secara

bertahap. Pendekatan bertahap ini mencerminkan logika prioritas berbasis persepsi pakar sekaligus menjaga keberlanjutan transformasi kelembagaan dalam jangka panjang.

4. Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa permasalahan utama penguatan kelembagaan petani dalam tata niaga beras Desa Rias bersifat fungsional-ekonomi, terutama terkait keterbatasan akses pembiayaan dan lemahnya kemitraan pasar. Berdasarkan hasil pembobotan AHP, kedua aspek tersebut menempati prioritas tertinggi dibandingkan penguatan kapasitas SDM dan reforma tata kelola kelembagaan. Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan utama transformasi kelembagaan bukan terletak pada aspek administratif semata, melainkan pada keterbatasan kapasitas ekonomi untuk menyerap gabah, mengelola waktu penjualan, dan memperluas akses pasar.

Hasil ini juga mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas SDM dan reforma tata kelola berfungsi sebagai faktor penopang keberlanjutan jangka menengah dan panjang, bukan sebagai kebutuhan operasional paling mendesak dalam konteks saat ini. Dengan demikian, logika implementasi strategi perlu dilakukan secara bertahap sesuai prioritas empiris, dimulai dari penguatan akses pembiayaan sebagai fondasi likuiditas, dilanjutkan dengan pengembangan kemitraan pasar untuk meningkatkan nilai tambah, kemudian peningkatan kapasitas SDM, dan secara simultan memperkuat tata kelola kelembagaan sebagai investasi institusional jangka panjang. Secara substantif, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kelembagaan petani merupakan fondasi strategis dalam membangun sistem tata niaga beras desa yang lebih efisien, adaptif, dan berdaya saing, terutama di wilayah kepulauan dengan keterbatasan struktur pasar dan akses distribusi.

Rekomendasi kebijakan dalam penelitian ini merupakan turunan langsung dari hasil prioritas AHP. Intervensi kebijakan perlu difokuskan terlebih dahulu pada pengembangan skema pembiayaan berbasis kontrak dan dukungan modal kerja kelembagaan agar mampu meningkatkan kapasitas serap gabah dan fleksibilitas pemasaran. Selanjutnya, pemerintah daerah perlu memfasilitasi kemitraan pasar jangka panjang yang mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah di tingkat desa. Pada tahap berikutnya, penguatan kapasitas manajerial dan akuntabilitas organisasi harus dilakukan melalui pendampingan berkelanjutan serta peningkatan legalitas kelembagaan menuju entitas bisnis agribisnis desa yang profesional. Dengan pendekatan bertahap dan terintegrasi tersebut, penguatan kelembagaan petani tidak hanya menjadi agenda normatif, tetapi merupakan strategi berbasis bukti empiris untuk meningkatkan efisiensi tata niaga dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abate, G. T., Francesconi, G. N., & Getnet, K. (2014). Impact of Agricultural Cooperatives on Smallholders' technical Efficiency: Empirical Evidence From Ethiopia. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 85(2), 257-286. <https://doi.org/10.1111/apce.12035>
- Agustin, I. N., Ainiyah, Z., Agustin, M. A., Agustina, P. D., & Franciska, C. A. (2025). Analisis Efektivitas Kelembagaan dalam Pengembangan Ekonomi Pertanian di Kecamatan Jogoroto. *Indonesian Journal of Business and Economics*, 1(2), 38-53.
- Andrianto, A. D. (2023). Transformasi Pertanian Masa Orde Baru dalam Mewujudkan Kemandirian Pangan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 11(2), 14-20.
- Fischer, E., & Qaim, M. (2012). Linking smallholders to markets: determinants and impacts of farmer collective action in Kenya. *World development*, 40(6), 1255-1268. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.11.018>
- Kusumadinata, A. A. (2024). Problematika Gapoktan di Indonesia: Studi Kasus Analisis Pemberitaan. *AGRINUS: Jurnal Agro Marin Nusantara*, 1(2), 194-203.
- Lee, J., Gereffi, G., & Beauvais, J. (2012). Global value chains and agrifood standards: Challenges and possibilities for smallholders in developing countries. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(31), 12326-12331. <https://doi.org/10.1073/pnas.0913714108>
- Markelova, H., Meinzen-Dick, R., Hellin, J., & Dohrn, S. (2009). Collective action for smallholder market access. *Food policy*, 34(1), 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2008.10.001>
- Nurmahdy, A. I., Machfud, M., & Syuaib, M. F. S. (2020). Kinerja Rantai Pasok Beras di Kabupaten Karawang. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 6(2), 325.
- Pangondo, E. H. (2024). Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani Padi Desa Rias Kabupaten Bangka Selatan Menggunakan Pendekatan IDF dan SWOT-QSPM. Universitas Bangka Belitung.
- Putri, F. A. S., Winarno, J., Setyowati, R., & Padmaningrum, D. (2024). Peran Gapoktan dalam Peningkatan Pendapatan Petani Tanaman Hias (Studi Kasus Gapoktan "Tani Makmur" Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar). *AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension*, 47(2), 69-78.
- Qomariyah, I. N., Kumala, S. L., Utami, I. N., Sholih, A. M., Kusumo, J. I., Amrullah, F. A., ... & Puspitasari, H. M. (2025). Penguatan Kelembagaan sebagai Strategi dalam Mendukung Adopsi Teknologi Sensor Budidaya Otomatis di Desa Matesih Karanganyar. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(4), 496-505.
- Rahmaniah, H. M., & Darma, R. (2023). *Inklusivitas pada Usahatani Kakao*. Unhas Press.
- Romadhona, I., Dewi, T. R., & Wardani, I. (2022). Pengaruh Kemitraan terhadap Pendapatan Usahatani Padi. *AGRISAINTEFIKA: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 6(2), 130-138.
- Saputra, R., & Rahman, D. (2024). Manajemen Pelatihan dalam Penguatan Kelompok Tani pada Pelaku Agribisnis Inklusif. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 10317-10326.

- Shaliha, M. B. (2022). Strategi Pengembangan Agribisnis Lada Putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Doctoral dissertation, IPB University).
- Verhofstadt, E., & Maertens, M. (2015). Can agricultural cooperatives reduce poverty? Heterogeneous impact of cooperative membership on farmers' welfare in Rwanda. *Applied Economic Perspectives and Policy*, 37(1), 86–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/aep/ppy021>
- Villamor, G. B., Dunningham, A., Stahlmann-Brown, P., & Clinton, P. W. (2022). Improving the representation of climate change adaptation behaviour in New Zealand's forest growing sector. *Land*, 11(3), 364. <https://doi.org/10.3390/land11030364>
- Widiarta, I. P. G. D., Andika, R., Aini, Q., Agung, A. P., & Qamara, C. (2025). Strategi Peningkatan Daya Saing Agribisnis Madu Kelulut melalui Inovasi Pemasaran dan Hilirisasi Produk. *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi*, 1(4), 245–253.